



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 874.553.916.593,00
b. Belanja	<u>Rp. 878.226.763.709,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp. 3.672.847.116,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 74.205.066.400,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 6.258.753.181,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp. 67.946.313.219,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 64.273.466.103,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.791.452.593,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 860.762.464.000,00 |
| (2) Realisasi | <u>Rp. 874.553.916.593,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 13.791.452.593,00 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 50.728.334.291,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| (1) Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 928.955.098.000,00 |
| (2) Realisasi | <u>Rp. 878.226.763.709,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 50.728.334.291,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 64.519.786.884,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) Defisit setelah perubahan | (Rp. 68.192.634.000,00) |
| (2) Realisasi | <u>(Rp. 3.672.847.116,00)</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | (Rp. 64.519.786.884,00) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 85.321.909,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| (1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 74.290.388.309,00 |
| (2) Realisasi | <u>Rp. 74.205.066.400,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 85.321.909,00) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 160.999.181,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 6.097.754.000,00 |
| (2) Realisasi | <u>Rp. 6.258.753.181,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 160.999.181,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 246.321.090,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| (1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 68.192.634.309,00 |
| (2) Realisasi | <u>Rp. 67.946.313.219,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 246.321.090,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp.1.372.193.319.456,08 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. 10.711.392.529,16 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp.1.361.481.926.926,92 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010	Rp. 73.752.888.309,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 101.484.520.491,00
c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp.105.157.367.607,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 5.806.575.090,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 0,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2010	Rp. 64.273.466.103,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR12

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	121.096.634.021,00	105.157.367.607,00	(15.939.266.414,00)	86,84
2.2.1	Belanja Tanah	1.856.500.000,00	1.442.533.625,00	(413.966.375,00)	77,70
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	30.171.372.921,00	19.666.378.763,00	(10.504.994.158,00)	65,18
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	57.051.628.600,00	53.001.065.041,00	(4.050.563.559,00)	92,90
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.628.075.000,00	17.438.322.500,00	(189.752.500,00)	98,92
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.389.057.500,00	13.609.067.678,00	(779.989.822,00)	94,58
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	209.900.000,00	(290.100.000,00)	41,98
2.3.1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	209.900.000,00	(290.100.000,00)	41,98
2.4	TRANSFER	2.000.000.000,00	1.999.999.686,00	(314,00)	100,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	2.000.000.000,00	1.999.999.686,00	(314,00)	100,00
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.000.000.000,00	999.999.843,00	(157,00)	100,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.000.000.000,00	999.999.843,00	(157,00)	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.192.634.000,00)	(3.672.847.116,00)	64.519.786.884,00	5,39
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	74.290.388.309,00	74.205.066.400,00	(85.321.909,00)	99,89
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	73.752.888.309,00	73.752.888.309,00	0,00	100,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	537.500.000,00	452.178.091,00	(85.321.909,00)	84,13
3.2	PENGELUARAN DAERAH	6.097.754.000,00	6.258.753.181,00	160.999.181,00	102,64
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.097.754.000,00	5.097.753.181,00	(819,00)	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.192.634.309,00	67.946.313.219,00	(246.321.090,00)	99,64
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	309,00	64.273.466.103,00	64.273.465.794,00	

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Urusan Wajib				
6.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat				
6.1.20.1.20.05	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
6.1.20.1.20.05.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	74.290.388.309,00	74.205.066.400,00	(85.321.909,00)	99,89
6.1.20.1.20.05.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.752.888.309,00	73.752.888.309,00	0,00	100,00
6.1.20.1.20.05.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	537.500.000,00	452.178.091,00	(85.321.909,00)	84,13
6.1.20.1.20.05.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.097.754.000,00	6.258.753.181,00	160.999.181,00	102,64
6.1.20.1.20.05.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00
6.1.20.1.20.05.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.097.754.000,00	5.097.753.181,00	(819,00)	100,00
6.1.20.1.20.05.2.5	Pemberian Pinjaman Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
6.1.20.1.20.05.2.6	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					
		JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	(%)
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8
	JUMLAH	807.307.000,00	1.848.236.454,00	13.506.369.546,00	16.161.913.000,00	(2.594.296.256,00)	83,95
		799.293.000,00	1.812.526.228,00	10.955.797.516,00	13.567.616.744,00		

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SR, RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN KUKUM

KODE			URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1			2	3	4	5	6
06			PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	35.155.726.000,00	33.439.365.764,00	(1.716.360.236,00)	95,12
06	1	03	Pekerjaan Umum	34.765.726.000,00	33.137.695.764,00	(1.628.030.236,00)	95,32
06	1	04	Perumahan	390.000.000,00	301.670.000,00	(88.330.000,00)	77,35
07			KESEHATAN	82.208.457.750,00	78.003.165.448,00	(4.205.292.302,00)	94,88
07	1	02	Kesehatan	80.789.130.000,00	76.663.330.198,00	(4.125.799.802,00)	94,89
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.419.327.750,00	1.339.835.250,00	(79.492.500,00)	94,40
08			PARIWISATA DAN BUDAYA	4.600.824.000,00	4.066.044.596,00	(534.779.404,00)	88,38
08	1	17	Kebudayaan	352.000.000,00	351.125.000,00	(875.000,00)	99,75
08	2	04	Pariwisata	4.248.824.000,00	3.714.919.596,00	(533.904.404,00)	87,43
10			PENDIDIKAN	504.834.221.000,00	477.615.323.329,00	(27.218.897.671,00)	94,61
10	1	01	Pendidikan	503.092.379.500,00	475.897.504.574,00	(27.194.874.926,00)	94,59
10	1	18	Kepemudaan dan Olah Raga	498.000.000,00	495.709.000,00	(2.291.000,00)	99,54
10	1	26	Perpustakaan	1.243.841.500,00	1.222.109.755,00	(21.731.745,00)	98,25
11			PERLINDUNGAN SOSIAL	9.849.496.450,00	9.471.191.922,00	(378.304.528,00)	96,16
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.514.008.000,00	3.387.443.215,00	(126.564.785,00)	96,40
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.873.215.250,00	5.641.264.507,00	(231.950.743,00)	96,05
11	1	13	Sosial	462.273.200,00	442.484.200,00	(19.789.000,00)	95,72
JUMLAH				928.955.098.000,00	878.282.817.239,00	(50.672.280.761,00)	94,55

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAHAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Piutang Pajak					
	1) Pajak Hotel	2009	1,038,000.00	-	1,038,000.00	-
	2) Pajak Restoran dan Rumah Makan	2009	-	-	-	-
	3) Pajak Reklame	2009	-	-	-	-
	4) Pajak Hiburan	2009	115,997,360.00	-	42,288,760.00	73,708,600.00
	5) Pajak Penerangan Jalan	2010	1,957,358,805.00	1,910,960,029.00	1,957,358,805.00	1,910,960,029.00
	Sub Jumlah Piutang Pajak		2,074,394,165.00	1,910,960,029.00	2,000,685,565.00	1,984,668,629.00
2	Piutang Retribusi					
	1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	2009	118,397,970.00	285,574,427.00	262,086,050.00	141,886,347.00
	2) Retribusi Kebersihan Obyek Wisata	2009	28,245,800.00	-	2,553,320.00	25,692,480.00
	3) Retribusi Ijin Penggunaan Tanah	2009	685,200.00	16,298,760.00	-	16,983,960.00
	4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2007 & 2008	-	17,382,400.00	-	17,382,400.00
	Sub Jumlah Piutang Retribusi		147,328,970.00	319,255,587.00	264,639,370.00	201,945,187.00
3	Piutang Lainnya					
	1) Piutang Askes	2009	150,976,681.00	365,018,805.00	149,536,181.00	366,459,305.00
	2) Piutang Jamkesmas	2009	2,791,230,171.00	632,049,758.00	2,791,230,171.00	632,049,758.00
	3) Piutang Jamsostek	2009	28,981,340.00	122,586,839.00	132,130,860.00	19,437,319.00
	4) Piutang kepada Kelompok Masyarakat Penerima Dana LUEP Propinsi	2009	1,215,850,000.00	-	-	1,215,850,000.00
	5) Piutang Lain-lain	2009	216,975,000.00	-	-	216,975,000.00
	Sub Jumlah Piutang Lainnya		4,404,013,192.00	1,119,655,402.00	3,072,897,212.00	2,450,771,382.00
	JUMLAH		6,625,736,327.00	3,349,871,018.00	5,338,222,147.00	4,637,385,198.00

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Disertakan sampai dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Yg Diterima Tahun Ini (Deviden)	Jumlah Modal (Investasi) yg diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan sampai dengan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 10 - 12
1	S.d Tahun 2010	APOTIK SUKOWATI	Perda APBD	Saham	3,000,000,000	500,000,000	-	500,000,000	2,500,000,000	-	-	500,000,000
2	S.d Tahun 2010	PD BANK DAERAH	Perda APBD	Saham	30,000,000,000	15,750,000,000	-	15,750,000,000	14,250,000,000	2,420,121,423	-	15,750,000,000
3	S.d Tahun 2010	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Perda APBD	Saham	40,000,000,000	23,950,500,000	-	23,950,500,000	16,049,500,000	1,100,000,000	-	23,950,500,000
4	S.d Tahun 2010	PD BPR BADAN KREDIT DESA	Perda APBD	Saham	15,000,000,000	12,250,000,000	-	12,250,000,000	2,750,000,000	1,291,400,000	-	12,250,000,000
5	S.d Tahun 2010	PD BPR BADAN KREDIT KECAMATAN TASIKMADU	Perda APBD	Saham	9,800,000,000	5,400,000,000	-	5,400,000,000	4,400,000,000	540,407,037	-	5,400,000,000
6	S.d Tahun 2010	PD BKK KARANGANYAR (Merger)	Perda APBD	Saham	7,350,000,000	5,356,199,000	-	5,356,199,000	1,993,801,000	275,929,253	-	5,356,199,000
13	S.d Tahun 2010	BANK BPD JAWA TENGAH	Perda APBD	Saham		8,332,000,000	161,000,000	8,493,000,000		2,488,753,495	-	8,493,000,000
14	S.d Tahun 2010	PT PRPP JAWA TENGAH	Perda APBD	Saham		160,000,000	-	160,000,000		-	-	160,000,000
15	S.d Tahun 2010	PT SOLO RAYA PROMOSI	Perda APBD	Saham		35,000,000	-	35,000,000		-	-	35,000,000
Jumlah					105,150,000,000	71,733,699,000	161,000,000	71,894,699,000	41,943,301,000	8,116,611,208	-	71,894,699,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj RINA IRIANI SRI RATHANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
 BAGIAN HUKUM

Nomor :

Tanggal :

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Tanah	3,251,615,535,300.00	12,901,791,625.00	3,106,672,564,080.00	157,844,762,845.00
2	Peralatan dan Mesin	163,758,080,307.00	51,148,419,645.00	38,472,306,149.00	176,434,193,803.00
3	Gedung dan Bangunan	465,819,255,543.00	181,493,410,635.00	139,028,469,176.00	508,284,197,002.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,006,977,740,219.00	36,657,064,378.00	734,245,405,747.00	309,389,398,850.00
5	Aset Tetap Lainnya	16,565,347,269.00	30,248,373,995.00	8,412,814,418.00	38,400,906,846.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	12,327,653,336.00	-	12,327,653,336.00
Jumlah		4,904,735,958,638.00	324,776,713,614.00	4,026,831,559,570.00	1,202,681,112,682.00

Bupati Karanganyar

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
 BAGIAN HUKUM

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
7	Peralatan Pertanian, Bangunan dan Jaringan Irigasi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang akan diserahkan kepada masyarakat.	-	3,158,418,300.00	-	3,158,418,300.00
8	Peralatan dan Mesin yang rusak berat direklasifikasi ke Aset Lainnya.	-	1,835,597,270.00	-	1,835,597,270.00
Jumlah		2,092,552,169.00	5,508,005,570.00	-	7,600,557,739.00

Bupati Karanganyar

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAHAN HUKUM

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1 dan Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun n	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8
1	<u>Dinas Pekerjaan Umum</u> 1.03. 1.03.01. 01. 02. 03	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	3,799,030,366.00	3,799,030,366.00	723,992,951.00
2	<u>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM</u> 2.06. 2.06.01. 18. 12	Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pasar Tuban Kecamatan Gondangrejo	-	-	8,472,192,970.00	8,472,192,970.00	1,901,882,400.00
3	2.06. 2.06.01. 18. 28	Pekerjaan Manajemen Konstruksi Revitalisasi Pasar Tuban Kecamatan Gondangrejo	-	-	69,930,000.00	69,930,000.00	62,755,000.00
			-	-	12,341,153,336.00	12,341,153,336.00	2,688,630,351.00

Bupati Karanganyar

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
 BACAN HUKUM

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			----- NIHIL -----					

Bupati Karanganyar

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	% Bunga Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga Rp	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	ADB	ADB Loan Agreement No.1998-INO, SLA-836/DP3/1996	31 Januari 1996	1,406,297,714	20 Tahun	11.75%	Pembiayaan Central Java & DIY Urban Development	93,753,181	69,829,192	515,642,496	141,653,777
2	Bank BPD Jateng	Perjanjian Kredit NO 5/PK/NOT/BPD/KRA/VIII/2008,	8 Juli 2008	20,000,000,000	4 Tahun	12%	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Tawangmangu	5,004,000,000	1,274,100,000	7,907,000,000	778,778,368
3	Pemprov. Jateng	Kesepakatan Bersama Pemprov Jateng dan PemKab Karanganyar Nomor : 520/03690	2008	3,000,000,000	1 Tahun	--	Pinjaman LUEP 2008	0	0	1,215,850,000	0
				24,406,297,714				5,097,753,181	1,343,929,192	9,638,492,496	920,432,145

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
 BAGIAN HUKUM

KD. REK	URAIAN	2010	2009
3	EKUITAS DANA		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	64,273,466,103.00	73,752,888,309.00
3.1.2	Cadangan Untuk Piutang	4,637,385,198.00	6,625,736,327.00
3.1.3	Cadangan Untuk Persediaan	10,135,852,043.00	4,398,168,426.00
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(7,045,883,374.30)	(7,657,532,373.04)
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	154,582,778.08	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	72,155,402,747.78	77,119,260,688.96
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	81,940,645,025.00	81,083,874,616.00
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1,202,681,112,682.00	4,904,735,958,638.00
3.2.3	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	8,217,807,739.00	2,092,552,169.00
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(3,513,041,266.86)	(9,343,074,641.12)
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1,289,326,524,179.14	4,978,569,310,781.88
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1,361,481,926,926.92	5,055,688,571,470.84
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,372,193,319,456.08	5,072,826,413,633.00

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAK DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

URAIAN	2010	2009
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52,958,605,952.00	48,896,734,514.00
Jumlah Arus Kas Masuk	52,958,605,952.00	48,896,734,514.00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52,958,605,952.00	49,467,937,737.00
Jumlah Arus Kas Keluar	52,958,605,952.00	49,467,937,737.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	0.00	(571,203,223.00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(9,479,422,206.00)	(30,600,620,482.00)
Saldo Awal Kas	73,752,888,309.00	104,353,508,791.00
Saldo Akhir Kas	64,273,466,103.00	73,752,888,309.00

Terdiri Dari :

Kas Di Kas Daerah	60,762,728,934.00	70,016,528,742.00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	66,372,859.00	1,002,197,235.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	3,444,364,310.00	2,734,162,332.00

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Tabel
Jumlah Pegawai Per Desember 2010

GOLONGAN	ESELON				NON ESELON		TOTAL
	II	III	IV	V	FUNGSIONAL	STAF	
IV/e	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	1	-	-	-	1	-	2
IV/c	9	-	-	-	12	1	22
IV/b	16	45	3	-	91	1	156
IV/a	-	74	97	-	4.389	17	4.577
JUMLAH	26	119	100	-	4.493	19	4.757
III/d	-	28	258	3	593	51	933
III/c	-	-	185	9	421	213	828
III/b	-	-	60	31	362	666	1.119
III/a	-	-	3	5	827	743	1.578
JUMLAH	-	28	506	48	2.203	1.673	4.458
II/d	-	-	-	-	165	154	319
II/c	-	-	-	-	249	415	664
II/b	-	-	-	-	267	488	755
II/a	-	-	-	-	136	1.039	1.175
JUMLAH	-	-	-	-	817	2.096	2.913
I/d	-	-	-	-	-	30	30
I/c	-	-	-	-	-	253	253
I/b	-	-	-	-	-	13	13
I/a	-	-	-	-	-	90	90
JUMLAH	-	-	-	-	-	386	386
TOTAL	26	147	606	48	7.513	4.174	12.514

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN CAPAIAN KINERJA BUMD
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	NAMA BUMD	RINGKASAN CAPAIAN KINERJA
1	PDAM Karanganyar	- Jumlah pelanggan sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 35.810 sambungan. Pemasangan pelanggan baru sebanyak 1.649 sambungan atau 144,65% dari target 1.140 sambungan baru - Laba sebelum pajak Rp 3.414.718.344,98 atau 98,15% dari target Rp 3.479.041.920 - Tingkat kebocoran air 19,44%, menurun dibanding tahun lalu 20,63% - Cakupan pelayanan 32,15%, meningkat dibanding tahun lalu 31,76%
2	BPR-BKK TASIKMADU	- Jumlah nasabah per 31 Desember 2010 sebanyak 11.009 nasabah. Jumlah nasabah lancar sebanyak 9434 rekening dengan nilai kredit Rp 51.405.394.000,00 menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 10.340 Rekening dengan nilai kredit Rp 52.756.449.000,00 - Laba sebelum pajak Rp 3.210.571.000,00 atau 106,72% dari target Rp 3.008.450.000,00
3	BKK KARANGANYAR	- Jumlah nasabah per 31 Desember 2010 sebanyak 6.325 nasabah. Jumlah nasabah lancar sebanyak 5.131 rekening dengan nilai kredit Rp 29.847.884.768,00 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4.863 rekening dengan nilai kredit Rp 26.859.168.527,00 - Laba sebelum pajak Rp 133.052.423.000,00 atau 117,58 % dari target Rp 113.161.437.000
4	BPR Bank Kredit Desa	- Jumlah nasabah per 31 Desember 2010 sebanyak 4.580 nasabah. Jumlah nasabah lancar sebanyak 4.013 rekening dengan nilai kredit Rp 59.795.373.000,00 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.519 rekening dengan nilai kredit Rp 59.173.539.000,00 - Laba sebelum pajak Rp 3.122.105.000,00 atau 110,16% dari target Rp 2.834.264.000,00
5	BPR BANK DAERAH	- Jumlah nasabah per 31 Desember 2010 sebanyak 8.692 nasabah. Jumlah nasabah lancar sebanyak 6.270 rekening dengan nilai kredit Rp 140.080.710.576,00 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 6.187 rekening dengan nilai kredit Rp 142.105.572.350,00 - Laba sebelum pajak Rp 5.158.924.092,38 atau 137,07% dari target Rp 3.763.723.000,00
6	APOTIK SUKOWATI	- Jumlah omzet penjualan selama tahun anggaran 2010 mengalami penurunan, yaitu hanya sebesar Rp 191.018.750,00 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 312.940.578,00 - Laba sebelum Pajak Tahun 2010 sebesar Rp 35.539.928 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu mengalami kerugian sebesar Rp 37.534.218,00

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Lampiran VI -1/3-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor :

Tanggal :

No.	Perusahaan Daerah	EKUITAS LAINNYA	LABA (RUGI) DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
A	BIDANG APOTIK Apotik Sukowati	9,106,112	35,478,310	637,998,422	100.00%	500,000,000
B	BIDANG AIR MINUM PDAM Kab Karanganyar	4,557,555,554	3,414,718,344.98	42,235,224,899	100.00%	23,950,500,000
C	BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN					
	1) PD BPR BANK DAERAH	5,854,646,000	6,652,805,000	28,257,451,000	100.00%	15,750,000,000
	2) PD BPR BADAN KREDIT DESA	3,159,155,000	2,464,635,000	17,873,790,000	100.00%	12,250,000,000
	3) PD BPR BKK TASIKMADU	1,580,733,000	3,329,440,000	16,310,173,000	49.00%	5,400,000,000
	4) PD BKK KARANGANYAR	535,176,663	(953,804,478)	8,137,573,031	49.00%	5,356,199,000
	Sub Jumlah C	11,129,710,663	11,493,075,522	70,578,987,031		38,756,199,000
	Jumlah A+B+C	15,696,372,329	14,943,272,177	113,452,210,352		63,206,699,000

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj RINA IRIANI SRI RATMANINGSIH, MHum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD / PERUSAHAAN DAERAH
LAPORAN RUGI/LABA TAHUN 2010

NO	Perusahaan Daerah	Pendapatan Operasional & Non Operasional	Biaya Oerasional dan Non Operasional	Laba Rugi Sebelum Pajak	Taksiran Pajak	Laba (Rugi) Bersih
A	BIDANG APOTIK Apotik Sukowati	191,018,750	155,478,822	35,539,928	-	35,539,928
B	BIDANG AIR MINUM PDAM Kab Karanganyar	23,043,102,123	19,628,383,778	3,414,718,345		3,414,718,345
C	BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN					
	1) PD BPR BANK DAERAH	32,290,762,000	25,637,957,000	6,652,805,000		6,652,805,000
	2) PD BPR BADAN KREDIT DESA	15,222,893,000	12,100,788,000	3,122,105,000	657,470,000	2,464,635,000
	3) PD BPR BKK TASIKMADU	18,173,832,000	14,963,261,000	3,210,571,000		3,210,571,000
	8) PD BKK KARANGANYAR	2,653,212,970	2,520,160,547	133,052,423		133,052,423
	Sub Jumlah C	68,340,699,970	55,222,166,547	13,118,533,423	657,470,000	12,461,063,423
	Jumlah A+B+C	91,574,820,843	75,006,029,147	16,568,791,696	657,470,000	15,911,321,696

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj RINA IRIANI SRI BATNANINGSIH, M.Hum

TELAH DIKOREKSI
 BAGIAN HUKUM